



## PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PER KAPITA, BELANJA DAERAH DAN ZAKAT TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA DUMAI

Lestary Fitriany, ST, ME

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

[abisofyserly@yahoo.com](mailto:abisofyserly@yahoo.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel PDRB per kapita, Belanja Daerah dan Zakat terhadap Kemiskinan di Kota Dumai dari tahun 2004 - 2013. Data dianalisis menggunakan regresi berganda time series. Penelitian membuktikan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kota Dumai hanya terjadi oleh pertumbuhan dalam PDRB per kapita, sementara pengeluaran daerah dan zakat tidak memiliki hubungan yang signifikan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa zakat yang tidak terkelola dengan baik, terbukti tidak mampu memberantas kemiskinan, sebagaimana kota Dumai pada rentang 2004-2013.*

*Kata kunci: PDRB per kapita, Belanja Daerah, Zakat, Kemiskinan.*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the relationship between variables of per capita GRDP, Regional Expenditures and Zakat on Poverty in Dumai City from 2004 - 2013. Data were analyzed using multiple time series regression. Research shows that poverty reduction in Dumai City only occurs by growth in GDP per capita, while regional expenditure and zakat do not have a significant relationship. This study also concludes that zakat that is not well managed has proven unable to eradicate poverty, as the city of Dumai range 2004-2013.*

**Keywords:** *per capita GRDP, Regional Expenditures, Zakat, Poverty.*

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita yang disertai upaya pengentasan kemiskinan antara lain dengan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas dan menciptakan kemandirian SDM sehingga berpeluang besar dapat berperan dalam memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi garis kemiskinan masih tinggi,



kaitannya dengan tingkat pengangguran atau minimnya ketersediaan lapangan kerja meskipun kota ini merupakan kota industri.

Kota Dumai merupakan salah satu daerah kota yang ada di Provinsi Riau, terbentuk pada tanggal 20 April 1999 yang semula merupakan kota Administratif berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis. Pembentukan Kota Dumai ini ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50. Kota Dumai dengan luas 1.727,38 Km<sup>2</sup>, yang sebelumnya hanya 5 Kecamatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 telah terbagi menjadi 7 kecamatan, yaitu Dumai Barat, Dumai Timur, Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang Kampai, Dumai Kota dan Dumai Selatan.

Dengan tersedianya sumber daya perekonomian di atas akan mampu menciptakan kontribusi yang lebih besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan kesempatan berusaha baru. Dan bila sumber daya perekonomian berkembang pesat sudah barang tentu akan memacu sector perekonomian lain. Dengan demikian berarti saat ini sangat berpotensi menjadi sumber pendapatan dan pembangunan Kota Dumai. Kota Dumai sebagai kota industri dengan sumbangan PDRB besar untuk provinsi, justru memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi.

Dari aspek lainnya, belanja daerah merupakan persolan penting dalam melihat kemajuan pembangunan disuatu daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Belanja Daerah merupakan belanja suatu daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Apabila terlaksana dan terdistribusi dengan baik hal ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Sebagai sebuah kota dengan mayoritas umat Islam potensi zakat di kota Dumai perlu mendapat perhatian. Konsep utama zakat sebagai mekanisme retribusi kekayaan dari golongan kaya kepada kelompok fakir dan miskin perlu mendapat intervensi pemerintah. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Penduduk Kota Dumai mayoritas beragama Islam, berkaitan dengan usaha pengentasan kemiskinan, pemerintah Kota Dumai juga memperhatikan peranan pendayagunaan dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Dumai. Pendayagunaan dana ZIS mempunyai dua sifat, yaitu bersifat santunan dan bersifat bantuan. Bersifat santunan artinya pendistribusian dana yang diberikan untuk kepentingan dan kegiatan konsumtif. Sedangkan bersifat bantuan berarti pendistribusian dana tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya umat dengan kegiatan produktif, harapannya dana yang diberikan kepada mustahik



(penerima zakat) dapat memerangi masalah kemiskinan yang diakibatkan ketidak pemilikan sumber daya modal yang memadai.

### **PENDEKATAN TERORITIS**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah/provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006).

Perkembangan PDRB terjadi akibat perubahan harga/produksi atau indikator produksi. Perubahan ini menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap sektor terhadap PDRB juga akan mengalami perubahan. Jika perkembangan setiap sektor tidak proporsional, misalnya beberapa sektor tertentu berkembang. lebih cepat dibanding sektor lainnya, maka dalam jangka panjang akan terjadi perubahan secara nyata (significant) sumbangan di setiap sektor. Perubahan ini dikenal sebagai perubahan struktur ekonomi. Secara teoritis yang disebut dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi tidak selalu ditandai dengan besarnya peranan suatu sektor dalam perekonomian, tetapi secara riil memang telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi di suatu sektor tertentu.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Melalui informasi PDRB ini, diharapkan dapat diketahui kondisi ekonomi makro Kota Dumai, karena pada dasarnya PDRB merupakan realisasi jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di daerah ini atas potensi sumber daya yang tersedia.

Sementara itu, Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah. Setiap tahun pemerintah daerah mempersiapkan perencanaan anggaran atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelola keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu yang berisi sumber pendapatan dan penggunaan dana pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2013 Belanja daerah harus dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung (Try, 2011). Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

Belanja tidak langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat, Belanja Bantuan Sosial, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, anggota masyarakat yang mengalami resiko sosial, Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Selain PDRB perkapita dan belanja daerah, variabel lain yang sangat menarik untuk diamati terkait dengan kemiskinan adalah Zakat. Zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). serta harta yang wajib di keluarkan zakatnya, syarat-syarat harta yang terkena zakat dan golongan yang berhak menerima zakat.

Zakat Fitrah adalah zakat diri atau pribadi dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah yaitu pada bulan ramadhan diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa, Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai memintaminta pada saat hari raya (Hasan, 2006).

Sementara itu zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Adapun kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya. Terdapat dua pandangan tentang kemiskinan menurut konvensional dan kemiskinan dan menurut Islam.



Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan antara kemiskinan menurut konvensional maupun kemiskinan menurut Islam.

Pengertian tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).

Kemiskinan dalam pengertian konvensional merupakan pendapatan (income) dari suatu kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu seringkali berbagai upaya pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi (Mariyanti, 2011).

Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena, (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai, (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontra produktif. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kemiskinan berasal dari kata dasar "miskin" yang artinya tidak berharta, serba kekurangan. Kemiskinan artinya keadaan yang miskin. Sumodiningrat (1999) mendefinisikan kemiskinan adalah "tingkat pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum".

Lewis (2003) mengatakan kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1993) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh simiskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Menurut Kadir (1993) kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Sumodiningrat (1999) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yakni : kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan nonmiskin dalam satu komunitas namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut.

Sedangkan menurut Jhingan (2000), mengemukakan tiga ciri utama Negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan yang ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Menurut Qardhawi (1996) dan Rasyid (1954) terdapat beberapa pendirian terhadap masalah kemiskinan Pertama kaum kapitalis memandang kemiskinan adalah menimbulkan problem yang harus diselesaikan dengan orang miskin sendiri, sedangkan orang kaya bebas dalam mempergunakan hartanya. Kedua, Kaum Marxis yang menyatakan bahwa kemiskinan itu bisa diatasi kalau kaum borjuis dan kekayaannya tidak dimusnahkan, tetapi lalu ditata kelaskelas baru.

Pendekatan kontemporer melihat bahwa penyebab kemiskinan bisa dilihat dari tiga teori Pertama, teori yang menekankan kepada pada nilai-nilai. Mereka miskin karena mereka bodoh, malas, tidak ulet, tidak mempunyai prestasi, fatalistik. Kedua, teori yang menekankan pada organisasi ekonomi masyarakat. Teori ini menganggap orang itu miskin karena kurangnya peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Ketiga, teori yang menekankan pada pembagian kekuasaan dalam struktur sosial dan tatanan masyarakat.

Tatanan dan struktur masyarakat yang ada dianggap sebagai hasil paksaan (bukan konsensus) sekelompok kecil anggota masyarakat yang berkuasa dan kaya akan mayoritas warga masyarakat miskin, dan inilah yang menjadi sebab kemiskinan. Jalan keluar dari teori ini bermacam-macam pula. Bagi teori pertama caranya mereka harus dicerdaskan, sedangkan bagi teori kedua caranya adalah perlu adanya industrialisasi agar ada tetesan ke bawah. Bagi teori ketiga yang di perlukan adalah perombakan struktur (Maududi, 1980).

Pandangan Islam, yang melihat fakta kefakiran/kemiskinan sebagai perkara yang sama, bahkan, pada zaman kapan pun, kemiskinan itu sama saja hakikatnya. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan dan papan. Allah SWT. berfirman : “Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf” (QSalBaqarah [2]:233). “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu” (QS ath-Thalaaq [65]:6). Rasulullah saw. bersabda: “Ingatlah,

bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan” (HR Ibnu Majah).

Dari ayat dan hadis di atas dapat di pahami bahwa tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan, sebagaimana firman Allah SWT: “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan” (QS al-Baqarah [2]:268).

Dengan demikian, siapapun dan dimanapun berada, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer)nya, yaitu sandang, pangan dan papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin. Oleh karena itu, setiap program pemulihan ekonomi yang ditujukan mengentaskan fakir miskin, harus ditujukan kepada mereka yang tergolong pada kelompok tadi. Baik orang tersebut memiliki pekerjaan, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara yang makruf, yakni fakir, maupun yang tidak memiliki pekerjaan karena PHK atau sebab lainnya, yakni miskin.

Salah satu bentuk penganiayaan manusia terhadap dirinya yang melahirkan kemiskinan adalah pandangannya yang keliru tentang kemiskinan. Karena itu langkah pertama yang dilaksanakan Al-Quran adalah meluruskan persepsi yang keliru itu. Seperti kita ketahui, sementara orang berpandangan bahwa kemiskinan adalah sarana penyucian diri, pandangan ini bahkan masih dianut oleh sebagian masyarakat hingga kini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain ditemukan penjelasan tentang arti kata "fakir" sebagai orang yang sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.

Dalam konteks penjelasan pandangan Al-Quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji kecukupan, bahkan Al-Quran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan atau kekayaan atau kecukupan. Seperti diantaranya:

“Apabila telah selesai shalat (Jumat) maka bertebaranlah di bumi dan carilah fadhil (kelebihan) dan Allah”. (QS Al-Jum'ah [62]: 10)

“Bukankah Allah telah menghasilkanmu miskin kemudian Dia menganugerahkan kepadamu kecukupan”? (QS Al-Dhuha [93]:8) “Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari fadhil (kelebihan) dari Allah (di musim haji)”. (QS Al-Baqarah [2]: 198).

Di sisi lain, Al-Quran mengecam mereka yang mengharamkan hiasan duniawi yang diciptakan Allah bagi umat manusia (QS Al-A'raf [7]: 32), dan menyatakan bahwa Allah menjanjikan ampunan dan anugerah yang berlebih, sedang setan menjanjikan kefakiran (QS Al-Baqarah [2]: 268). Meskipun demikian, Islam tidak menjadikan banyaknya harta sebagai tolok ukur kekayaan, karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati dan kepuasannya.

Menurut Qardhawi (1996) dalam Islam ada dua madzhab dalam menjelaskan tentang siapa sebenarnya yang disebut miskin itu. Pertama, madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat miskin itu adalah "orang yang tidak mempunyai sesuatupun juga". Kedua, madzhab Hambali dan Syafi'i yang menyatakan miskin itu adalah "orang yang mempunyai seperdua dari keperluannya atau

lebih tetapi tidak mencukupi". Dalam kehidupan kita, biasanya kata miskin dijadikan kata majemuk dengan fakir, sehingga menjadi faqir miskin yang artinya kurang lebih sama. Dan fakir dapat disamakan dengan kemiskinan absolut dan miskin dengan kemiskinan relatif.

Menurut Qardhawi (1996) dan Rasyid (1954) terdapat beberapa pendirian terhadap masalah kemiskinan Pertama, pendirian yang menyucikan kemiskinan. Bagi golongan ini kemiskinan bukan masalah yang harus dipecahkan, tetapi harus dibiarkan, karena dengan demikian manusia bisa berkonsentrasi berhubungan dengan Tuhannya, tidak di ganggu dengan urusan duniawi. Kedua, pendirian para fatalis yang menganggap bahwa kemiskinan itu merupakan taqdir Allah dan manusia harus sabar dengan ujian itu. Ketiga, pendirian ketiga sama dengan fatalis, namun mereka maju selangkah. Yaitu secara perorangan mereka harus membantu orang orang miskin. Madzhab ini dikenal sebagai "kebajikan pribadi". Keempat, kaum kapitalis memandang kemiskinan adalah menimbulkan problem yang harus diselesaikan dengan orangmiskin sendiri, sedangkan orang kaya bebas dalam mempergunakan hartanya. Kelima, kaum Marxis yang menyatakan bahwa kemiskinan itu bisa diatasi kalau kaum borjuis dan kekayaannya tidak dimusnahkan, tetapi lalu ditata kelas-kelas baru.

Mannan (2006) memandang kemiskinan dari dua sisi yaitu kemiskinan materi (dilihat dari sisi ekonomi yaitu jika dia tidak kaya, tidak bisa menabung dan pendapatan kecil) dan kemiskinan spiritual. Karena Islam telah mengajarkan bahwa kemiskinan spiritual akan membuat kemerosotan moral. Menurut Wibisono (2007) fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan usaha sama sekali dan miskin adalah memiliki harta dan usaha namun tidak bisa memenuhi kebutuhan.

### Kesimpulan

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, belanja daerah, zakat dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PDRB perkapita (X1) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y) di kota Dumai. Dimana dari hasil penelitian diperoleh koefisien transformasi regresi untuk variabel PDRB perkapita sebesar -6,649 yang berarti berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan. Selain itu, nilai signifikansi yang dimiliki sebesar 0,000 dimana nilai ini sangat signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat signifikansinya kurang dari 0,05% maka dalam hal ini pengaruh PDRB perkapita terhadap kemiskinan positif dan sangat signifikan.
2. Belanja daerah (X2) secara bersama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y) di kota Dumai. Dimana dari hasil penelitian diperoleh koefisien transformasi regresi untuk variabel belanja daerah sebesar -0,103 yang berarti berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan. Selain itu, nilai signifikansi yang dimiliki sebesar 0,170 dimana nilai ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05.
1. Karena tingkat signifikansinya lebih dari 0,05% maka dalam hal ini pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan bersifat negatif tetapi tidak signifikan. Namun secara parsial model hubungan diantara belanja daerah terhadap kemiskinan di kota Dumai adalah  $Y' = 18,034 - 0,001 X1 + e$ . Pengaruh variabel belanja daerah terhadap kemiskinan bersifat signifikan



karena angka signifikansi yang dimiliki adalah sebesar 0,002, dimana angka tersebut jelas lebih kecil dari 0,05. Artinya secara parsial terdapat hubungan yang bersifat negatif diantara variabel belanja daerah terhadap kemiskinan, dan hubungan sangat signifikan.

2. Zakat (X3) secara bersama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y) di Kota Dumai. Dimana dari hasil penelitian diperoleh koefisien transformasi regresi untuk variabel zakat sebesar 0,012 yang berarti berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Selain itu, nilai signifikansi yang dimiliki sebesar 0,010 dimana nilai ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Karena tingkat signifikansinya kurang dari 0,05% maka dalam hal ini pengaruh pembiayaan zakat terhadap kemiskinan positif tetapi signifikan. Namun ketika dilakukan analisis secara parsial terdapat hubungan yang bersifat negatif diantara variabel zakat terhadap kemiskinan tetapi hubungan tidak signifikan.

### **Keterbatasan penelitian**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi :

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, belanja daerah, zakat dan tingkat kemiskinan.
2. Data penelitian ini menggunakan periode pengamatan selama 10 tahun mulai dari tahun 2004-2013 sedangkan untuk tahun 2014 belum dapat diperoleh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu 'Ubaid al-Qasim. 2009, Ensiklopedia Keuangan Publik, Gema Insani, Jakarta.
- Adebayo, Dr. R. Ibrahim, Zakat dan Pengentasan Kemiskinan : Pelajaran untuk Pengambil Kebijakan Fiskal di Nigeria.
- Alawi, 2006, Anggaran Pengeluaran Pembangunan Daerah, Dumai.
- Ali, Mohammad Daud. 2012, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Ariefianto, Doddy. 2012, Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan Eviews, Erlangga.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Ash Shadir, Muhammad Baqir. 2008, Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtishaduna, Zahra, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai. 2005. Dumai dalam Angka 2004. Dumai.
- \_\_\_\_\_, 2006. Dumai dalam Angka 2005. Dumai.
- \_\_\_\_\_, 2007. Dumai dalam Angka 2006. Dumai.
- \_\_\_\_\_, 2008. Dumai dalam Angka 2007. Dumai.
- \_\_\_\_\_, 2009. Dumai dalam Angka 2008. Dumai.
- \_\_\_\_\_, 2010. Dumai dalam Angka 2009. Dumai.
- \_\_\_\_\_, 2011. Dumai dalam Angka 2010. Dumai.



- \_\_\_\_\_, 2012. Dumai dalam Angka 2011. Dumai.
- \_\_\_\_\_, 2013. Dumai dalam Angka 2012. Dumai.
- \_\_\_\_\_, 2013. Dumai dalam Gambar 2012. Dumai.
- \_\_\_\_\_, 2014. Dumai dalam Angka 2013. Dumai.
- Baroroh, Ali. 2013, Analisis Multivariat dan Time Series dengan SPSS 21, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Beik, Irfan Syauqi. dan Arsyianti, Laily Dwi. 2015, Ekonomi Pembangunan Syariah, IPB Press, Bogor.
- Departemen Agama RI, 2007, Al Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Dyah Arini Rudiningtyas, 2008, Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran (Studi Pada APBN 2004-2008), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang (UNISMA), Malang.
- Farah Aida Ahmad adzri, Rashidah Abd Rahman dan Ormah Omar, Zakat dan Pengentasan Kemiskinan: Peran Lembaga Zakat di Malaysia, Akuntansi Research Institute, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor..
- Faturrohim, Rahmawati. 2011, Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah), Jurusan Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. 2014, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-syari'ah, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gujarati, Damodar N. Buku I, 2012, Dasar-dasar Ekonometrika Basic Econometrics, Salemba Empat, Jakarta.
- Gujarati, Damodar N. Buku II, 2012, Dasar-dasar Ekonometrika Basic Econometrics, Salemba Empat, Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2005, Anda Bertanya tentang Zakat, Infak dan Sedekah Kami Menjawab, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Jakarta .
- Hakim, Lukman. 2012, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Haughton, Jonathan and Khandker, Shahidur. 2009. "Handbook of Poverty and Inequality". The World Bank, Washington DC.
- Indraningrum, Try. 2011, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah), Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jhingan, M.L. 2003, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.



- Khan, M. Fahim. dan Rosyidi, Suherman, 2014, Esai-esai Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latan, Hengky. 2013, Model Persamaan Struktural Teori dan Implementasi AMOS 21.0, CV. ALFABETA.
- Lukman Harun, Ghozali Maski, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur).
- Mannan, Prof. M. Abdul, 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mariyanti, Tatik. 2011, Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Penurunan Kemiskinan di Indonesia Dalam Perspektif Islam, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Mariyanti, Tatik. 2013, Persepsi Publik tentang Zakat di Indonesia, Artikel pada Republika bagian Jurnal Ekonomi Islam tanggal 25 Juli 2013, hal 18.
- Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran, Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997, Kamus al-Munawar, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Nachrowi, D Nachrowi, MSc., Mphil., AppSc., PhD, 2006, Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi, Jakarta.
- Nisjar, Karhi. dan Winardi. 1997, Ilmu Ekonomi Makro, Mandar Maju, Bandung. Naf'an, 2014, Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nursyamsiah, 2008, "Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengentas Kemiskinan Di Kota Dumai", Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, Ranti Wiliasih, 2009, Ekonomi Makro Islam, Kencana, Jakarta.
- Pradja, Juhaya. 2012, Ekonomi Syariah, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Priyo, Hari. 2006, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah, dalam Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Pusat Pengpenelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, 2008, Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Qardhawi. 1996, Konsep Islam dalam Mengentaskan kemiskinan, Surabaya : Bina Islam, 1996 hal. 12-17
- Qardhawi, Yusuf. 1997, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Robbani Press, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 1996, Hukum Zakat, terjemahan, Mizan, Bandung.



- Qodir, Abdurrahman. 1998, Zakat dalam Demensi Mahdah dan sosial, Jakarta : Rajak Rafindo Persada.
- Safi'I. 2007, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Averroes Press, Malang.
- Sajogyo. 1977. Garis Miskin dan Kebutuhan Minimum Pangan. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan (LPSP). IPB. Bogor
- Santoso, Singgih (2000). Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sasana, Hadi (2009). Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10 (1) Juni.
- Sinnathurai Vijayakumar, "Sebuah Studi Empiris pada Nexus Kemiskinan, Pertumbuhan PDB, Rasio Ketergantungan dan Ketenagakerjaan di Negara Berkembang", Departemen Ekonomi, Universitas Jaffna. Sri Lanka.
- Sukirno, Sadono. 2013, Makro Ekonomi, Teori Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sukmaraga, Prima. 2011, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah", Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sumodiningrat Gunawan , Budi Santoso, Mohamad Maiwan (1999), Kemiskinan : Teori, Fakta dan Kebijakan , Edisi pertama, penerbit Impac, Jakarta.
- Syarul, 2009, Pengaruh Anggaran Pengeluaran Pemerintah Pendayagunaan Dana ZIS, dan PDRB per Kapita Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta), Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1989, Perencanaan Pembangunan, CV. Haji Masagung, PT. Inti Idayu Press dan Yayasan Masagung, Jakarta.
- Todaro , Michael P. (1995), Pembangunan Ekonomi Di Dunia ke Tiga. Edisi 3. Jilid 1.2 Erlangga. Jakarta.
- Vegirawati, Titin. 2012, Pengaruh Alokasi Belanja Langsung terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan), Universitas IBA, Palembang.
- Widiastuti, 2010, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota Dumai Tahun 2004-2008, Dumai.
- Zuhaily, Wahbah al. 2000, Zakat Penelitian berbagai Mazhab, alih Bahasa oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fanany.